

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

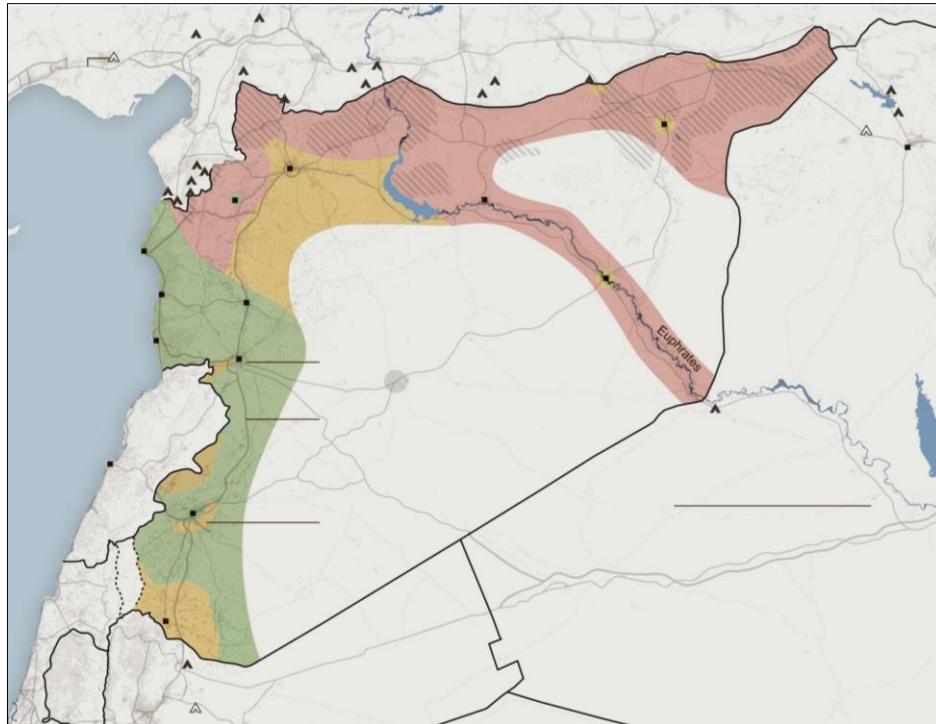
Berakhirnya perang dingin menyebabkan perubahan tatanan keamanan politik internasional yang berdampak terhadap dinamika tatanan keamanan di dalamnya. Perubahan ini ditandai dengan absennya sistem bipolar dan transformasi ke multipolar. Namun situasi tersebut tidak menjadikan konsepsi keamanan tradisional ditinggalkan. Keamanan tradisional identik dengan isu yang bersifat *high politics* hubungan antar – negara seputar militer, kebijakan pertahanan, kekuatan dan kapabilitas. Keamanan tradisional melihat dari ancamannya ditujukan kepada negara yang menekankan pada keamanan militer dan politik (Swanström, 2010, hal. 38). Hal ini terjadi karena ancaman yang ditujukan suatu negara terhadap negara lain menggunakan kombinasi aspek keamanan militer dan politik.

Melalui konteks karakteristik keamanan tradisional, kepentingan strategis negara masih menjadi perhatian utama dalam isu hubungan internasional. Isu kepentingan strategis yang menarik perhatian dalam beberapa waktu terakhir adalah isu keamanan di kawasan. Kedudukan kawasan dalam isu hubungan internasional memiliki peran penting dikarenakan kawasan merupakan tempat bertemunya aktor global dengan aktor-aktor nasional di sekitar kawasan yang seringkali mendominasi isu-isu internasional (Buzan & Waever, 2003, hal. 43). Kawasan Timur Tengah masih menjadi kawasan yang mewarnai isu hubungan internasional kontemporer dengan problematika di dalamnya. Problematika ini meliputi isu-isu laten seperti sengketa Israel-Palestina maupun paling kontemporer Paska-Arab Spring: Konflik Bersenjata di Yaman, Perpecahan Arab Saudi (dan sekutunya) dengan Qatar, Rivalitas Arab Saudi-AS-Israel dengan Iran hingga Konflik Bersenjata di Suriah.

Kontestasi politik di Suriah ini dipandang oleh berbagai kubu sebagai ajang adu kekuatan dalam memperebutkan kontrol atas wilayah *Levant* dan Asia Barat. Secara tidak langsung ini telah menjadikan posisi Suriah sebagai pintu masuk ke ‘jantung’ kawasan strategis *Levant* dan Asia Barat. Yang dimaksud sebagai kawasan *Levant* dalam hal ini merujuk kepada wilayah Mandat Perancis di sekitar tepi Mediterania paska-Perang Dunia I yakni Suriah-Palestina-Israel-Yordania-Siprus. Walaupun dalam beberapa terminologi yang berbeda, *Levant* juga mencakup wilayah hingga ke Semenanjung Sinai di Mesir (Gagarin, 2010, hal. 248).

Sudah sejak lama posisi Suriah yang sangat berharga ini diperebutkan oleh sejumlah kubu di kawasan. Bagi kubu koalisi anti-Iran (Arab Saudi-Israel-AS), Suriah memiliki peranan kunci guna membendung perluasan pengaruh Iran melalui *proksi*-nya di Lebanon (Hezbollah) dan Palestina (Hamas). Kubu koalisi anti-Iran juga melihat potensi terbukanya akses darat langsung yang menghubungkan Iran-Irak-Suriah-Lebanon dikhawatirkan akan semakin memperkuat gerakan perlawanan anti-Israel yang berpotensi mengancam keamanan Israel. Di sisi lain bagi Arab Saudi menguatnya Iran akan melemahkan kedudukan Arab Saudi sebagai negara anti-gerakan revolusioner. Sedangkan bagi kubu pro-Iran, hal ini justru menjadi peluang guna menancapkan pengaruh ke kawasan *Levant* dan Asia Barat sekaligus memperkuat posisinya sebagai *regional power* menandingi Arab Saudi dan mitra koalisinya di kawasan. Sehingga dari pandangan tersebut, gambaran konflik di Timur Tengah yang melekat seputar isu sengketa Israel-Palestina kini telah bergeser pada konflik kepentingan geopolitik dan geostrategis di Suriah yang diboncengi oleh gerakan Arab Spring (Barnes-Dacey & Levy, 2013, hal. 10).

Arus pergolakan Arab Spring mulai memasuki Suriah pada Maret 2011 (Kargin, 2018, hal. 35). Pada awalnya fenomena Arab Spring hanya terjadi di beberapa negara (Tunisia 2010, Mesir 2011, Libya 2011) berhasil menurunkan pemerintahan otoriter yang telah lama berkuasa. Dukungan AS terhadap gerakan ini diresmikan melalui pernyataan pemerintahan Obama dan Duta Besar AS untuk Suriah. Tidak hanya itu, AS juga berupaya menggalang dukungan dari komunitas internasional untuk menekan pemerintahan Bashar al-Assad melaksanakan transisi kekuasaan melalui kekuatan pengaruh politik global AS (Hardin Lang, 2014, hal. 3-4). Di Suriah, gerakan ini memprotes dan menuntut perubahan terhadap penyimpangan kebijakan pemerintah Suriah. Gerakan yang dimotori oleh kelompok oposisi pemerintahan Bashar Al-Assad ini mulanya berjalan damai dan tertib. Respon Pemerintah Suriah yang ‘koersif’ dalam menanggapi gerakan tersebut telah menghilangkan arahnya menjadi gerakan perlawanan bersenjata yang menciptakan berbagai faksi dengan latarbelakang berbeda (Sinan al-Hawat, 2015, hal. 30).



Gambar 1: Peta Konflik Bersenjata di Suriah Maret 2013. Pemerintah (Hijau), Kuning (Kurdi), Merah (FSA)

Sumber: <https://www.nytimes.com>

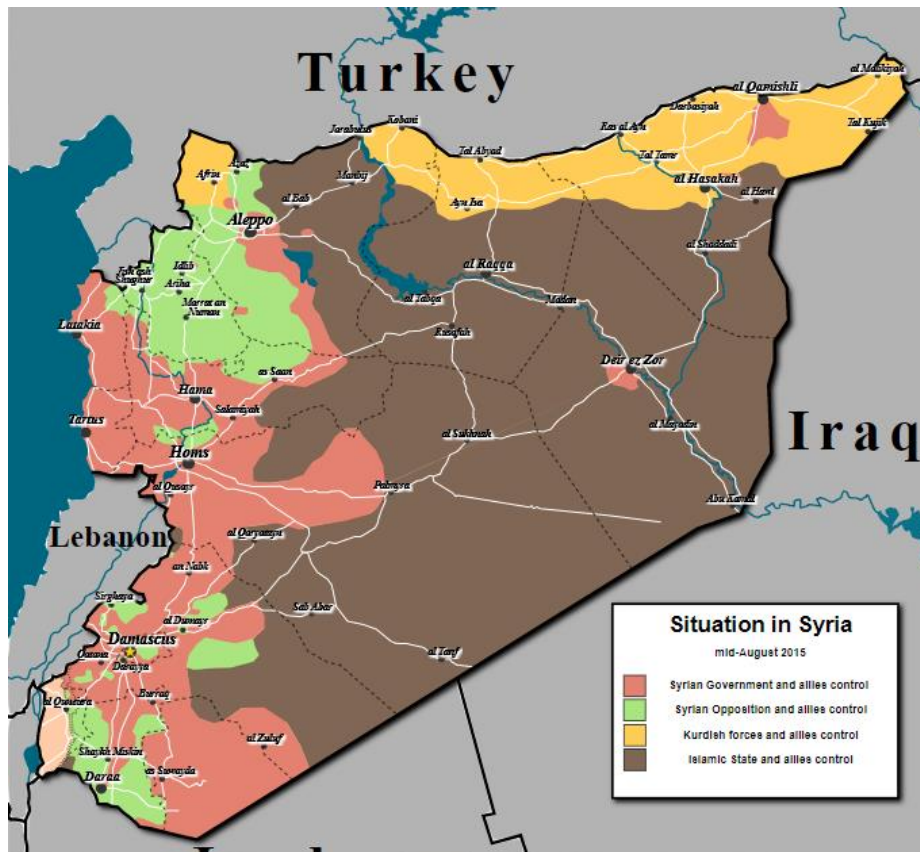
Keberadaan aktor non-negara tersebut semakin memperumit keadaan ketika datangnya dukungan dari aktor eksternal untuk menyokong faksi-faksi tersebut. Dalam pernyataannya di tahun 2012, AS akan mengirimkan bantuan persenjataan ringan dan anti-tank kepada berbagai faksi-faksi utama pemberontak yang berperang melawan pemerintah Assad (Hardin Lang, 2014, hal. 5-6). Langkah AS ini juga diikuti oleh mitra strategisnya di kawasan seperti Arab Saudi, Qatar, Yordania dan Israel. Akibat dukungan ini menyebabkan intensitas konflik semakin serius dengan munculnya berbagai kelompok bersenjata seperti FSA, AQ, SDF, ISIS dan afiliasinya yang memanfaatkan kekacauan politik dan keamanan di Suriah dan sekitarnya.

Keberadaan faksi-faksi anti-pemerintah ini masing-masing memperoleh dukungan politik dan finansial dari berbagai negara seperti AS, Arab Saudi, Qatar hingga Turki. Akibatnya berbagai faksi tersebut semakin menguat dan mengontrol sebagian besar teritorial yang menyebabkan wilayah Suriah terfragmentasi. Hal ini semakin diperparah dengan penguasaan sumberdaya perekonomian strategis oleh faksi-faksi anti-pemerintah yang digunakan sebagai sumber pendanaan konflik serta kerusakan sarana-infrastruktur akibat konflik yang semakin larut (Shaheen, 2015).

Pada tahun 2014, Pemerintah Suriah hanya mengontrol wilayah kurang lebih 20% dari total wilayah Suriah dengan sisanya berada di bawah kendali faksi-faksi bersenjata anti-pemerintah (Strack, 2015). Di tahun yang sama tujuan pemberontakan mulai kehilangan arah dengan konflik yang terjadi antar-faksi bersenjata anti-pemerintah yakni FSA, *Islamic Front*, *Al-Nusra* saling berperang satu sama lain memperebutkan wilayah kekuasaan (Buyukkasap, 2016, hal. 3-5). Situasi ini semakin kompleks akibat menguatnya kelompok ISIS yang mengeksploitasi keadaan dengan wilayah taklukan yang membentang dari Irak ke Suriah. Menguatnya kelompok ISIS menjadi momentum bagi AS untuk meningkatkan dukungan persenjataan ke barisan faksi oposisi moderat di Suriah guna menghentikan ekspansi ISIS sekaligus memperkuat faksi oposisi moderat melawan ISIS. Namun fakta yang terjadi di lapangan, kebijakan ini justru menjadikan posisi IS semakin kuat di Suriah karena ditenggarai terjadi penyelewengan senjata bantuan AS ke faksi FSA yang berpindah tangan ke kelompok teroris (Conflict Armament Research, 2017, hal. 53).

Di tahun 2015 penguatan ISIS terlihat melalui wilayah kekuasaannya yang membentang dari Timur hingga ke Barat Suriah yang juga dipengaruhi dengan bergabungnya faksi-faksi FSA ke dalam ISIS semakin mempercepat perkembangan ISIS. Belum terhitung dengan kekuasaan ISIS di Irak yang telah berhasil menguasai tempat-tempat strategis seperti Mosul, Tikrit dan Baiji.

Berpalingnya faksi-faksi FSA dan menguatnya ISIS menyebabkan AS mulai mengandalkan faksi SDF (*Syrian Democratic Forces*) yang saat itu menghadapi gempuran dari ISIS secara sengit dalam ancaman pengepungan di kota Kobane, 2014. Dukungan AS terhadap faksi SDF yang mayoritas adalah etnis Kurdi mendapat protes keras dari Turki sebagai mitra strategis AS. Protes Turki ini melihat dukungan AS terhadap Kurdi akan memperkuat posisi Kurdi dalam pergerakan politiknya (Jan Joel Andersson, 2015). Penguatan posisi Kurdi ini dianggap sebagai ancaman untuk politik dalam negeri Turki yang telah dilanda konflik *insurjensi* melawan PKK (faksi Kurdi Turki) sejak tahun 1978.



Gambar 2: Situasi Militer di Suriah Agustus 2015. Pemerintah (Merah), Pemberontak (Hijau), *Islamic State* (Hitam).
 Sumber: www.upload.wikimedia.org

Berdasarkan fenomena masalah di atas yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diketahui bahwa posisi pemerintah Suriah berada dalam situasi yang sulit. Situasi tersebut telah membawa Suriah ke arah destabilisasi yang mengancam kedaulatannya. Konflik Bersenjata yang berlangsung di Suriah dapat mengancam Suriah menjadi *failed state*. Potensi jatuhnya Suriah ini secara tidak langsung akan mengancam kepentingan nasional negara yang menjadi mitra strategis Suriah. Kepentingan negara mitra strategis Suriah dipandang dari segi geostrategis dan geopolitik telah menyebabkan Suriah menjadi prioritas bagi sejumlah negara di dalam dan luar kawasan. Prioritas terhadap Suriah ini telah diagendakan dalam kebijakan luar negeri negara-negara mitra strategisnya seperti Iran dan Rusia.

Nilai strategis ini tidak bisa dihindari oleh Rusia. Nilai strategis Suriah adalah menyediakan satu dari dua pangkalan militer Rusia di luar wilayah eks-Soviet. Keberadaan pangkalan militer *overseas* Rusia di Suriah berada di Tartus untuk Angkatan Laut merupakan satu-satunya akses keberadaan Rusia secara politik di kawasan Mediterania, mengingat

kawasan Mediterania didominasi oleh negara-negara anggota NATO (Inggris, Italia, Perancis dan AS) (Becker, 2018, hal. 2-4).

Sebagai salah satu mitra strategis, Rusia telah lama menjalin kemitraan dengan Suriah. Kemitraan strategis ini dimulai di masa perang dingin ketika Suriah membutuhkan mitra adidaya di luar kawasan untuk mendukung kebijakan anti-Israel. Keberadaan Amerika di kawasan sebagai sekutu alami Israel paska Perang Arab-Israel 1967 menjadi pertimbangan sekaligus celah bagi Uni Soviet untuk meningkatkan kemitraan strategis dengan Suriah (Machairas, 2017, hal. 5). Celah ini dimanfaatkan dengan baik oleh Uni Soviet mengingat saat itu terjadi ketegangan di kawasan antara Suriah-Israel paska Perang Arab-Israel 1967. Kebutuhan Suriah akan bantuan militer Soviet dilatarbelakangi dengan ketidakpastian situasi keamanan kawasan dengan Israel dan rivalitasnya dengan negara tetangganya (Irak-Turki) (Wallsh, 2013, hal. 111). Paska bubarnya Uni Soviet, Suriah berupaya menyesuaikan keadaan melalui membangun kerjasama strategis dengan kekuatan Barat dalam partisipasinya di koalisi internasional untuk mengusir pendudukan Irak di Kuwait bersamaan dengan ketidakpastian tatanan keamanan global paska bubarnya Uni Soviet serta dominasi unipolar AS (Wallsh, 2013, hal. 115).

Di tahun 1992, dibukanya lembaran baru hubungan kemitraan Rusia-Suriah ditandai dengan kunjungan diplomatik pertama Presiden Hafez al-Assad ke Moskow. Interaksi Rusia-Suriah ini didasarkan pada kekhawatiran bersama terhadap dominasi AS paska perang dingin. Dominasi AS ini ditunjukkan dengan langkah unilateralisme AS di Timur Tengah dengan kebijakan intervensi di sejumlah negara di kawasan seperti di Kuwait (1991), Afghanistan (2001) dan Irak (2003). Dominasi AS dalam politik internasional dan di Timur Tengah telah menyebabkan Rusia frustrasi dan memaksanya untuk menyusun strategi kebijakan baru. Strategi yang dimaksud adalah meningkatkan kerjasama strategis Rusia-Suriah (Hadar, 2005).

Memasuki tahun 2000, hubungan kemitraan strategis ini mendapatkan momentumnya ketika figur Bashar Al-Assad dan Vladimir Putin naik ke tampuk kekuasaan bersamaan dengan perbaikan kebijakan luar negeri Rusia untuk kembali menjadi pemain perpolitikan global yang berpengaruh (Florene Gaub, 2013). Kemitraan strategis Rusia-Suriah mulai menjajaki tingkat yang lebih serius pada tahun 2005 melalui kunjungan pertama Bashar al-Assad ke Moskow. Hasil dari pertemuan tersebut adalah pengampunan hutang-hutang luar negeri Suriah di era Uni Soviet sebesar 73% dari total \$13,4 milyar. Tidak hanya itu, Rusia

juga menyediakan Suriah sejumlah perangkat sistem pertahanan defensif dalam menghadapi ketegangan politik dengan Israel (Kreutz, 2010, hal. 14).

Dengan situasi internasional yang tidak menentu dan menguatnya kelompok teroris menjadi dasar bagi Rusia untuk ikut menopang pemerintahan Suriah yang berada di saat kritis. Kemitraan Rusia-Suriah ini dihadapkan dengan situasi yang terjadi di Suriah secara tidak langsung memaksa Rusia untuk menunjukkan komitmennya sebagai mitra strategis bagi Suriah. Bagi Rusia, institusi negara dinilai lebih efektif dalam menghadapi kelompok teroris yang mesti dikuatkan perannya dengan tetap mendukung Suriah sebagai negara berdaulat (Stent, 2016, hal. 109). Sebelum permohonan asistensi militer Suriah, sejak 2013 Rusia telah menyediakan dukungan dan perlindungan diplomatik terhadap Suriah melalui posisinya sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Bagi Suriah, perlindungan diplomatik ini dapat mencegah adanya sanksi lebih lanjut dan kemungkinan terjadinya potensi intervensi internasional yang dipimpin AS (Allison, 2013).

Pada September 2015, Pemerintah Suriah secara resmi mengajukan bantuan kepada Rusia untuk membantu menyelesaikan permasalahan konflik di internalnya. Hal ini berarti Suriah mengajak Rusia berperan lebih jauh untuk terlibat dalam penyelesaian problematika perpolitikan dan keamanan di Timur Tengah. Bantuan ini dilayangkan dalam surat resmi Presiden Bashar al-Assad kepada Presiden Putin. Menindaklanjuti permohonan bantuan Suriah, Presiden Putin meminta persetujuan parlemen Rusia (*Duma*) untuk menggunakan kekuatan militer secara terbatas dalam bentuk *deployment* angkatan udara (Walker, 2015). Persetujuan ini mengizinkan Rusia membangun dan meningkatkan kekuatan pangkalan militer Rusia di Tartus dan Latakia guna menguatkan posisi pemerintahan Bashar al-Assad sekaligus melakukan upaya proyeksi kekuatan militer. Hal ini juga ditambah dengan konsesi Pangkalan Udara Hmeimim sebagai salah satu instrumen tambahan yang diberikan Suriah kepada Rusia. Dengan pentingnya fasilitas di Tartus dan Latakia, Rusia memiliki pijakan pengoperasian militernya serta memperoleh superioritas udara atas wilayah Suriah dan kawasan Mediterania Timur (Mayers, 2018).

Di 2016 Rusia semakin meningkatkan intensitas asistensi militernya melalui pengiriman beberapa kekuatan tulang punggung angkatan lautnya ke kawasan Timur Laut Mediterania. Hal ini bertujuan untuk menjaga dan mencegah adanya potensi kekuatan lain yang mengancam maupun mengganggu infrastruktur militer Rusia di Suriah yang mayoritas terkonsentrasi di pesisir Barat Suriah (Tartus, Latakia). Pada tahun ini pula Rusia juga mulai

menginisiasi forum perdamaian Suriah yang lebih dikenal sebagai Konferensi Astana dengan melibatkan beberapa kekuatan kawasan seperti Iran dan Turki.

Memasuki 2017, Rusia memotori kesepakatan zona de-eskalasi dalam kerangka kerjasama *trilateral* bersama Iran dan Turki untuk mengakomodasi kepentingan seluruh pihak, terutama dalam memberikan waktu rekonsolidasi dan penyelesaian masalah kemanusiaan. Di samping zona de-eskalasi, Rusia mengirimkan Batalion Polisi Militer sebagai implementasi pengawasan pelaksanaan zona de-eskalasi yang telah disepakati. Kesepakatan kerjasama *trilateral* ini secara tidak langsung telah meninggalkan kekuatan tradisional lain di Timur Tengah seperti Saudi, AS dan Qatar dalam upaya menyelesaikan persoalan konflik di Suriah (Fainberg, 2017, hal. 17).

Pada tahun 2018, terjadi insiden salah tembak pesawat patroli Rusia IL-20 di kawasan pesisir Mediterania oleh militer Suriah. Kejadian ini bersamaan dengan serangan udara Israel di kawasan sekitarnya menyebabkan kesalahan identifikasi oleh sistem pertahanan udara Suriah. Atas insiden ini Rusia telah mengirimkan sistem pertahanan udara S-300 untuk menggantikan milik Suriah yang telah usang. Insiden ini telah memberikan peningkatan perlindungan udara bagi Suriah atas aset strategisnya dari serangan pihak eksternal.

Dari runutan fakta di atas, tatanan keamanan kawasan Timur Tengah yang selama ini berada di bawah unipolarisme AS akan mendapatkan tantangan baru dengan masuknya Rusia ke kawasan melalui intervensinya di Suriah. Tantangan ini diharapkan bagi Rusia mentransformasi tatanan keamanan unipolarisme ke multilateral di kawasan, meninggalkan format tradisional *zero-sum game* yang selama ini menjadi strategi AS dengan berupaya menjaga *status-quo* pengaruhnya di Timur Tengah.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latarbelakang di atas, penulis mencatat sejumlah masalah yang menarik untuk diteliti, yaitu kebijakan intervensi Rusia dalam konflik bersenjata di Suriah periode 2015 – 2018. Penelitian ini mengambil periode yang dimulai dari September 2015 karena pada waktu tersebut Rusia mulai terlibat langsung dalam konflik di Suriah membantu pihak Pemerintah Suriah. Sedangkan untuk batas waktu penelitian, penulis menetapkan pada akhir September 2018 dimana di waktu tersebut Rusia mengirimkan asistensi militer melalui pengiriman senjata strategis S-300 paska insiden salah tembak oleh Suriah terhadap pesawat IL-20 milik Rusia.

Berdasarkan masalah di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang terkait, yaitu: **Bagaimana Implikasi Perkembangan Tatanan Keamanan di Timur Tengah Paska-Intervensi Militer Rusia di Suriah Periode 2015-2018?**

Alasan ini didasarkan pada langkah intervensi militer Rusia di Suriah yang dilatarbelakangi oleh kepentingan Rusia sebagai *greatpower* melalui kapabilitasnya dalam mendukung pemerintahan Assad di Suriah guna mengembalikan *law and order* institusi negara Suriah guna membendung sekaligus menghentikan destabilisasi yang terjadi di Suriah dan Timur Tengah agar tidak mendekati Rusia. Sangat diyakini intervensi Rusia merupakan langkah nyata dari upaya proyeksi kekuatan Rusia sebagai pemain global dalam menyelesaikan konflik di Suriah disamping mengisi celah perpecahan yang terjadi di kawasan. Atas motif dasar tersebut Rusia mau menerima undangan resmi Pemerintah Suriah untuk membantu penyelesaian permasalahan internalnya dan diyakini dapat menciptakan kestabilan kawasan terhadap ancaman yang dapat mengganggu kepentingan nasional Rusia.

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, tujuan yang ingin penulis capai, yaitu:

- A. Untuk menjelaskan implikasi intervensi militer Rusia di Suriah terhadap tatanan keamanan kawasan di Timur Tengah.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan

a. Manfaat Praktis

Memberikan pemahaman gambaran mengenai kondisi tatanan keamanan kawasan di Timur Tengah sebelum dan sesudah intervensi militer Rusia di Suriah.

b. Manfaat Akademis

Memberikan informasi dan data yang jelas bagi program studi Ilmu Hubungan Internasional terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam rangka memberikan pemahaman yang runut dalam penelitian ini, penulis membagi penelitian ini menjadi lima bab yang terdiri dari:

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan juga meliputi

tujuan penelitian, manfaat penelitian serta bagian-bagian teknis dari penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai tinjauan kepustakaan yang digunakan dalam penelitian, kerangka pemikiran, alur pemikiran dan asumsi penelitian.

BAB III

METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan menguraikan konsep dan teknis penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data serta waktu dan lokasi penelitian.

BAB IV

PERUBAHAN KONFIGURASI KEKUATAN DI KAWASAN TIMUR TENGAH

Pada bab ini akan menjelaskan dinamika-dinamika interaksi dan peranan-kepentingan strategis Rusia di kompleks keamanan Timur Tengah.

BAB V

INTERVENSI MILITER RUSIA DI SURIAH

Bab ini akan menjelaskan mengenai langkah strategi Rusia dalam intervensinya di Suriah serta konsekuensinya di arena perpolitikan kawasan

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada Bab ini penulis memberikan pokok kesimpulan dari keseluruhan pembahasan.

DAFTAR PUSTAKA